

**EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI SD NEGERI 1 TANJUNG PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
MENIK SULISTYANINGSIH
1223303081**

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI 1 TANJUNG PURWOKERTO

Oleh : Menik Sulistyaningsih

NIM 1223303081

Abstrak

Kebijakan Pendidikan Inklusif masih menyisakan berbagai permasalahan khususnya dalam proses pengimplementasiannya. Seperti belum adanya pemahaman mengenai kebijakan inklusif, belum tertampungnya anak-anak yang teridentifikasi berkebutuhan khusus dalam sekolah-sekolah inklusif dan belum tersedianya sumber daya pendidik sekolah inklusif yang memadai. Maka dari itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto selama ini, menemukan apa yang menjadi kendala keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto; menemukan upaya sekolah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deksriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto. Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan empat guru Inklusif. Objek dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: Ada standar/ kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu berupa surat keputusan Bupati Banyumas tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada tahun 2011 dengan nomor surat 421/149/2011, yang masing-masing setiap sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif mendapatkan surat keputusan tersebut. Pendidikan Inklusif merupakan salah satu model pendidikan yang dirancang secara khusus, dan merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan khususnya bagi mereka Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk menghindari adanya segregasi. Demikian juga proses pembelajaran di kelas inklusif, walaupun siswanya heterogen, tidak ada perbedaan yang begitu berarti dengan proses pembelajaran di kelas reguler. Menurut penulis dalam penelitian ini proses pembelajaran di kelas inklusif cukup berhasil, dan keberhasilan dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor dari guru, siswa, lingkungan, sarana prasarana, dan evaluasi pembelajaran.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF	
A. Evaluasi Kebijakan.....	14
B. Pendidikan Inklusif	20

1. Pengertian Pendidikan Inklusif	20
2. Tujuan Pendidikan Inklusif	20
3. Sasaran Pendidikan Inklusif	21
4. Landasan Pendidikan Inklusif	23
5. Karakteristik Pendidikan Inklusif.....	30
6. Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusif.....	31
C. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif	35
1. Subjek Pendidikan Inklusif	35
2. Sasaran Pendidikan Inklusif.....	36
3. Alat Pendidikan Inklusif	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknis Analisis Data.....	48
BAB IV KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI 1 TANJUNG PURWOKERTO	
A. Gambaran Umum SDN 1 Tanjung Purwokerto	51
1. Letak Geografis SDN 1 Tanjung Purwokerto.....	51
2. Sejarah dan Perkembangan SDN 1 Tanjung Purwokerto .	51
3. Visi dan Misi SDN 1 Tanjung Purwokerto.....	53

4. Keadaan Guru dan Peserta Didik SDN 1 Tanjung Purwokerto	54
5. Keadaan Sarana dan Prasarana SDN 1 Tanjung Purwokerto	57
6. Gambaran Umum Pendidikan Inklusif SD Negeri I Tanjung Purwokerto	59
B. Penyajian Data.....	60
1. Substansi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	61
2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif	65
3. Dampak Adanya Kebijakan Pendidikan Inklusif	73
C. Analisis Data	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	81
C. Kata Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Menurut Direktorat Pembinaan SLB, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Semangat pendidikan inklusif adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.¹

Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, non formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.²

¹Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm.43

²http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia.html, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 10:00

Seiring berjalannya waktu, pendidikan mengalami perubahan yang sangat pesat. Ditandai dengan adanya perkembangan berbagai macam metode pembelajaran, kurikulum, kebijakan-kebijakan, dan lain sebagainya yang dilakukan demi tercapainya tujuan pendidikan. Perubahan tersebut disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk menghadapi permasalahan di era yang semakin global seperti saat ini. Dengan demikian pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa adanya pendidikan kehidupan manusia tidak akan pernah berkembang dan tidak akan mampu menghadapi berbagai macam permasalahan yang dihadapinya.

Tujuan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah sistem pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, terjadilah proses transformasi ilmu dari guru ke murid untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Untuk mencapai kualitas inilah diperlukan adanya tujuan pendidikan yang jelas dan terarah, maka akan menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan melahirkan generasi yang berkualitas, baik kecerdasannya maupun moralnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Pendidikan memang menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia , termasuk pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang oleh pemerintah pun diatur dalam undang-undang. Bagi sebagian bahkan banyak orang mengenyam pendidikan bukanlah hal yang sulit, apalagi bagi mereka yang termasuk dalam golongan *high class*. Namun, mengenyam pendidikan menjadi suatu masalah tersendiri bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti cacat mental dan fisik. Para orang tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini, mempunyai kendala tersendiri dalam mencari sekolah-sekolah khusus dalam rangka memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya.

Pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 32 mengamanatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sebagai berikut : “Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional dan sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Ketetapan tersebut memberikan landasan yang kuat bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan formal dan pengajaran seperti anak normal. Melalui

³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/tujuan_pendidikan.html, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 10:15

undang-undang tersebut juga, pemerintah menyatakan kepeduliannya terhadap pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.⁴

Berbicara mengenai pendidikan dan anak berkebutuhan khusus mungkin memang tidak akan ada habisnya. Saat ini, terdapat kecenderungan adanya pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif sendiri adalah pendidikan pada sekolah umum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memerlukan pendidikan khusus pada sekolah umum dalam satu kesatuan yang sistematis.⁵ Nampaknya sekolah dengan layanan pendidikan inklusif menjadi alternatif para orang tua dari anak berkebutuhan khusus agar dapat menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah formal umum.

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Teknis penyelenggaraannya tentu akan diatur dalam bentuk peraturan operasional. Maka pendidikan inklusif sebisa mungkin dapat diintegrasikan dengan pendidikan reguler. Dengan melihat landasan yuridis tersebut, tidak ada kata menolak bagi sekolah-sekolah reguler untuk menerima anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun realitas yang terjadi, banyak sekolah-sekolah yang tidak mau menerima anak berkebutuhan khusus dengan berbagai alasan.⁶

⁴<https://digilib.uns.ac.id.pdf> , diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 10:18

⁵Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat*, (Yogyakarta: Katahati, 2012), hlm. 90

⁶ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.

Penelitian telah dilakukan terhadap 12 sekolah penyelenggara inklusi di Kabupaten dan Kota Bandung dan terdapat permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, permasalahan tersebut antara lain yaitu:

1. Belum didukung dengan system dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi-LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas.
2. Keterlibatan orangtua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya orangtua sering bersikap kurang peduli dan realistis terhadap anaknya.
3. Peran SLB yang diharapkan mampu berfungsi sebagai resource centre bagi sekolah-sekolah inklusi di lingkungannya, belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik karena belum adanya koordinasi dan kerjasama maupun alasan geografis.
4. Peran ahli yang diharapkan dapat berfungsi sebagai media konsultasi, advokasi dan pengembangan SDM sekolah masih sangat minimal.
5. LPTK PLB dalam diseminasi hasil penelitian, penelitian kolaborasi maupun dalam implementasi terhadap hasil-hasil penelitian belum dapat diwujudkan dengan baik.
6. Peran pemerintah yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi inklusi secara baik dan benar melalui regulasi

aturan maupun bantuan secara teknis, dinilai masih kurang perhatian dan kurang proaktif terhadap permasalahan nyata di lapangan.

7. Walaupun pemerintah saat ini sudah mengikutkan guru-guru dalam pelatihan ataupun memberikan bantuan yang sifatnya fisik atau keuangan, namun jumlahnya masih sangat terbatas dan belum merata.
8. Sekolah umumnya juga belum didukung fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aksesibilitas dan keberhasilan pembelajaran secara memadai.⁷

Dari permasalahan pendidikan inklusif di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menyelenggarakan pendidikan inklusif bukanlah hal yang mudah. Untuk itu diperlukan evaluasi yang dilakukan terus-menerus agar kebijakan pendidikan inklusif dapat berjalan secara lebih efektif. Evaluasi ini sangat penting dilakukan, mengingat evaluasi merupakan kegiatan menilai sesuatu, untuk mengetahui sesuatu tersebut telah sesuai dengan tujuan atau belum. Kebijakan pendidikan inklusif yang sedang diimplementasikan di sekolah harus dievaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut, juga untuk memperbaiki implementasi kebijakan itu.

Salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusif ini adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung, kecamatan Purwokerto Selatan, kota Purwokerto. Sekolah ini dipilih berdasarkan surat keputusan Bupati Banyumas tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan nomor 421/149/2011 pada tahun 2011 dan SD N 1 Tanjung ini juga telah cukup lama

⁷Mudjito, *Memahami Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hlm. 69-70

melaksanakan pelayanan pendidikan inklusif mengingat bahwa pendidikan inklusif saat ini masih menjadi hal yang baru di kabupaten Banyumas. Dengan adanya layanan pendidikan inklusif di SD tersebut, warga masyarakat sekitar yang mempunyai putra putri berkebutuhan khusus menjadi terbantu dari segi pendidikannya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus pun dapat belajar dan bermain bersama anak-anak normal pada umumnya, tanpa adanya pembatas antara yang normal dan ABK.

Seperti observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 25 Juli 2016, di SD Negeri 1 Tanjung yang beralamat di Jl. Gerilya No. 263 Tanjung Purwokerto Selatan, yang merupakan SD Negeri reguler seperti pada umumnya dan SD Inklusi yang melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menjadikannya sebagai penelitian dengan mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 1 Tanjung”.

B. Definisi Operasional

Judul yang dipilih penulis adalah “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto”. Untuk menghindari kesalahpahaman judul, maka penulis tegaskan kata kunci dari tema judul di atas.

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan

dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.⁸

Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama- sama dengan peserta didik pada umumnya.⁹

Dengan demikian pendidikan inklusif menyatukan anak-anak yang reguler atau normal dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam satu ruangan dan dalam waktu pembelajaran yang sama tanpa adanya pemisah diantara mereka.

3. SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto

SD N 1 Tanjung adalah SD Negeri di UPK Purwokerto Selatan yang ditunjuk sebagai SD Rintisan SD Inklusi sejak tahun pelajaran 2004-2005.

⁸<https://fikiporniadi.blogspot.co.id/2014/04/evaluasi-kebijakan.html>, diakses pada 21 November 2016 pukul 08:00

⁹Mudjito, *Memahami pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014) hlm. 68

Walaupun dengan segala kemampuan yang dimiliki kepala sekolah dan guru, proses pembelajaran siswa reguler dan ABK dapat berjalan lancar.

Jadi yang dimaksud penulis dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto” adalah suatu penelitian tentang bagaimana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto ?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto selama ini.
- b. Menemukan apa yang menjadi kendala keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto.
- c. Menemukan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk:

- 1) Memperoleh kesimpulan keilmuan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pendidikan inklusif.
- 2) Sebagai bahan empirik kontekstual bagi pengelola lembaga pendidikan dalam menerapkan pendidikan inklusif.
- 3) Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pendidikan inklusif.

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk :

- 1) Secara praktek, kajian empirik ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang evaluasi kebijakan pendidikan inklusif. Selain itu juga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pengelola sekolah/ lembaga pendidikan guna menemukan kekurangan dan kelemahan dalam penerapan pendidikan inklusif.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah mempelajari terlebih dahulu beberapa buku dan judul skripsi yang sekiranya bisa dijadikan bahan acuan dan referensi. Adapun yang menjadi bahan tinjauan pustaka :

1. Terry Irenewaty dan Aman dalam penelitiannya membahas tentang evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada standart/kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pelaksanaan pendidikan inklusif tergantung dari kesediaan sekolah itu sendiri.¹⁰

2. Kamal Fuadi dalam skripsinya membahas tentang pendeskripsian kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan implementasi kebijakan tersebut di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah.¹¹
3. Redi Susanto dalam skripsinya membahas tentang efektivitas program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Giwangan yang diantaranya meliputi : tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) efektivitas dilihat dari tenaga pendidik sudah efektif, ketersediaan GPK dan kerjasama antara guru kelas. Guru kelas juga dituntut untuk mengerti dan memahami secara benar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, 2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilihat dari sarana dan prasarana di SDN Giwangan sudah efektif dalam pemanfaatan sarana dan prasarana, walaupun jumlahnya masih terbatas, 3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilihat dari kurikulum SDN Giwangan belum efektif. SDN

¹⁰Terry Irenewati & Aman, *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta*, 2006, <https://digilib.uns.ac.id.pdf> , diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 10:18

¹¹ Kamal Fuadi, *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta*, 2011, <http://www.skripsitentangkebijakanpendidikaninklusif.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 20:02

Giwangan belum mempunyai kurikulum yang mengacu pada program penyelenggaraan pendidikan inklusif, 4) SDN Giwangan sudah melakukan monitoring dan evaluasi secara efektif. Sistem dan bentuk evaluasi untuk anak berkebutuhan khusus hampir sama dengan anak reguler, hanya saja standar nilainya lebih rendah.¹²

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab. Uraian masing masing bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang akan membahas tentang evaluasi kebijakan, pendidikan inklusif, evaluasi kebijakan pendidikan inklusif.

Bab ketiga berisi metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi pembahasan, tentang hasil penelitian berupa penyajian data tentang evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto, serta analisis data.

¹²Redi Susanto, *Efektivitas Program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SDN Giwangan*, 2012, <http://www.skripsitentangkebijakanpendidikaninklusif.pdf>, hlm. vii, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 20:07

Bab kelima berisi penutup berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata-kata penutup, kemudian bagian yang paling akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pendidikan Inklusif merupakan salah satu model pendidikan yang dirancang secara khusus, dan merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan khususnya bagi mereka Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk menghindari adanya segregasi. Demikian juga proses pembelajaran di kelas inklusif, walaupun siswanya heterogen, tidak ada perbedaan yang begitu berarti dengan proses pembelajaran di kelas reguler. Menurut penulis dalam penelitian ini proses pembelajaran di kelas inklusif cukup berhasil, dan keberhasilan dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor dari guru, siswa, lingkungan, sarana prasarana, dan evaluasi pembelajaran.

Faktor dari guru yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru. Dengan kompetensi yang dimiliki, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang tepat, metode yang digunakan, media, juga evaluasi.

Faktor dari siswa yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda sehingga output yang dihasilkan pun antara siswa satu dengan yang lain akan berbeda pula. Keberadaan mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya ada saling ketergantungan, tetapi di

sini bukan ketergantungan dalam arti yang negatif tetapi ketergantungan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Meskipun terkadang terjadi kegaduhan di dalam kelas, karena memang dari faktor umur mereka yang masih tergolong anak-anak.

Faktor lainnya adalah lingkungan, letak SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto, yang menurut penulis cukup strategis. Selain itu dukungan keluarga yang merupakan salah satu bagian dari lingkungan juga memiliki andil besar dalam menyukseskan pembelajaran. Perhatian orangtua dalam lingkungan keluarga sangat penting terutama dalam memberikan pengalaman pertama pada anak-anak karena pengalaman pertama merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi dan emosional anak sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh anak.

Faktor yang lainnya lagi yaitu sarana dan prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran khususnya untuk pembelajaran siswa inklusi atau ABK.

Faktor yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran, adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan para siswa di SD Negeri 1 Tanjung khususnya murid inklusi. Jika dalam hasil evaluasi pembelajaran hasilnya baik, maka pendidikan inklusif bisa dikatakan berjalan sesuai dengan tujuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto, tanpa mengurangi rasa hormat perkenankanlah penulis untuk menyampaikan sedikit saran kepada:

1. Kepala Sekolah

Dengan seringnya dilakukan pengawasan dan evaluasi, maka kebijakan pendidikan inklusif dan pengimplementasiannya akan semakin berjalan dengan baik lagi.

2. Guru Inklusi dan Guru lainnya

Dalam menangani siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, pastinya akan membutuhkan kerjasama antara guru inklusi dan guru lainnya agar penerapan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik. Wujud dari kerjasama tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Sesama guru harus saling peduli, saling membantu dan saling mengingatkan.
- b. Guru inklusi harus dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif
- c. Ada baiknya guru profesional terhadap profesinya
- d. Guru hendaknya mempunyai perilaku yang santun, arif dan bijaksana mengingat posisi guru itu menjadi tempat untuk digugu lan ditiru.

C. Kata Penutup

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, penulis berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa, guru dan masyarakat pada umumnya. Akhirnya penulis berdoa semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik material, spiritual, tenaga dan pemikiran. Semoga amal baiknya mendapat keridhoan dan balasan dari Allah SWT.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi & Jabar, Cipi Safruddin Abdul, 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto. Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Azwar, Saifudin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Fuadi, Kamal. 2011. *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta*, <http://www.skripsitentangkebijakanpendidikaninklusif.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 20:02
- Garnida Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: Refika Aditama
- Geniofam. 2010. *Mengasuh dan Mensukseskan anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Garailmu.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metode Reseach II*. Yogyakarta: Ando Offset.
- Ilahi Mohammad Takdir. 2016. *Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Irenewati, Terry & Aman, 2006, *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta*, <https://digilib.uns.ac.id/pdf> , diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 10:18
- John W. Creswell. 2010. *Reseach Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mudjito, 2014. *Memahami pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Setiawati, Evi. 2015. *Profil Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta*, <http://www.skripsitentangkebijakanpendidikaninklusif.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 20:11

Smart, Aqila. 2012. *Anak Cacat Bukan Kiamat*, Yogyakarta: Katahati.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta,

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Susanto, Redi. 2012. *Efektivitas Program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SDN Giwangan*, <http://www.skripsitentangkebijakanpendidikaninklusif.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 20:07

Umar, Husein. 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia.html, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 10:00

https://id.m.wikipedia.org/wiki/tujuan_pendidikan.html, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 10:15

<https://digilib.uns.ac.id.pdf> , diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 10:18

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan.html>, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul 11:00

<https://fikiporniadi.blogspot.co.id/2014/04/evaluasi-kebijakan.html>, diakses pada 21 November 2016 pukul 08:00

<https://xpresipena.blogspot.co.id/2011/11/evaluasi-kebijakan-publik.html?m=1>, diakses pada 26 Januari 2017 pukul 06:21